A logo with a red and white letter k









AI-generated content may be incorrect.]]-------

Yth.

1. Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan
2. Direksi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Syariah,

di tempat.

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR .../SEOJK.06/2025

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RANCANGAN | TANGGAPAN | USULAN PERUBAHAN |
| Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian tingkat kesehatan dan peringkat komposit tingkat kesehatan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |  |
|  |  |  |
| 1. KETENTUAN UMUM |  |  |
| 1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. |  |  |
| 1. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |
| 1. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Penyelenggara konvensional yang melaksanakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI. |  |  |
| 1. Modal Disetor adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |
| 1. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Penyelenggara yang dilakukan terhadap permodalan, kualitas Pendanaan, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. |  |  |
| 1. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| 1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagai berikut: |  |  |
| * 1. berorientasi risiko; |  |  |
| * 1. proporsionalitas; |  |  |
| * 1. materialitas dan signifikansi; dan |  |  |
| * 1. komprehensif dan terstruktur. |  |  |
| 1. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain: |  |  |
| 1. penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara didasarkan pada risiko Penyelenggara dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Penyelenggara secara keseluruhan; |  |  |
| 1. penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Penyelenggara pada saat ini dan masa yang akan datang; dan |  |  |
| 1. Penyelenggara diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Penyelenggara serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien. |  |  |
| 1. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain: |  |  |
| 1. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Penyelenggara; |  |  |
| 1. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Penyelenggara; dan |  |  |
| 1. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Penyelenggara dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Penyelenggara sehingga dapat mencerminkan kondisi Penyelenggara dengan lebih baik. |  |  |
| 1. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain: |  |  |
| 1. Penyelenggara perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara yaitu permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor; dan |  |  |
| 1. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Penyelenggara. |  |  |
| 1. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain: |  |  |
| 1. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Penyelenggara; |  |  |
| 1. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara; dan |  |  |
| 1. analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sejalan dengan pertumbuhan industri LPBBTI dan dalam rangka memastikan keberlanjutan usaha, Penyelenggara melakukan penilaian Tingkat Kesehatan sendiri untuk mengetahui kinerja yang sebenarnya. |  |  |
| 1. Penyelenggara melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang memiliki UUS melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi UUS secara individual. |  |  |
| 1. Penilaian tingkat kesehatan bagi UUS secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara yang menjadi induknya. |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor: |  |  |
| 1. permodalan; |  |  |
| 1. kualitas Pendanaan; |  |  |
| 1. rentabilitas; |  |  |
| 1. likuiditas; dan |  |  |
| 1. manajemen. |  |  |
| 1. Penyelenggara yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada angka 3, melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi UUS secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor: |  |  |
| * 1. kualitas Pendanaan; |  |  |
| * 1. rentabilitas; dan |  |  |
| * 1. likuiditas. |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan ditetapkan 5 (lima) peringkat komposit dengan kategori sebagai berikut: |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 1 (sangat sehat); |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 2 (sehat); |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 3 (cukup sehat); |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 4 (kurang sehat); dan |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 5 (tidak sehat); |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan paling sedikit Peringkat Komposit 3. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan yang dilakukan oleh Penyelenggara maka yang berlaku hasil penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. |  |  |
| 1. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling sedikit dilakukan terhadap paramater atau indikator pemenuhan ketentuan: |  |  |
| * 1. memiliki Ekuitas minimum setiap saat paling sedikit Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah); dan |  |  |
| * 1. menjaga rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen). Yang dimaksud dengan rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor adalah perbandingan antara jumlah Ekuitas Penyelenggara terhadap jumlah Modal Disetor. Rasio ini menunjukkan besaran modal yang harus disiapkan untuk mengantisipasi kegagalan Penyelenggara dalam mengelola Ekuitas. |  |  |
| 1. Selain penilaian terhadap komponen sebagaimana angka 3, Penyelenggara harus mempertimbangkan penilaian kualitatif, yaitu: |  |  |
| * 1. analisis kualitatif terhadap komponen-komponen sebagaimana angka 3 dengan menilai kontribusi dan signifikansi pada masing-masing komponen; dan |  |  |
| * 1. kemampuan Penyelenggara dalam mengelola permodalan. |  |  |
| 1. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana angka 2, dilakukan terhadap parameter atau indikator kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko, paling sedikit: |  |  |
| 1. manajemen permodalan, yang ditunjukkan antara lain dengan penilaian atas pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan modal, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, dan penilaian kecukupan modal; dan |  |  |
| 1. kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal, yang ditunjukkan antara lain melalui akses sumber modal baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan atau pihak lain yang dapat mendukung permodalan Penyelenggara; |  |  |
| 1. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor permodalan yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: |  |  |
| 1. peringkat 1; |  |  |
| 1. peringkat 2; |  |  |
| 1. peringkat 3; |  |  |
| 1. peringkat 4; dan |  |  |
| 1. peringkat 5, |  |  |
| dengan urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan sesuai dengan tabel I.B. Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor permodalan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam tabel I.C Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN FAKTOR KUALITAS PENDANAAN |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor kualitas Pendanaan meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: |  |  |
| 1. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. |  |  |
| 1. Penilaian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap komponen kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap parameter pemenuhan ketentuan Penyelenggara wajib menjaga rasio Pendanaan macet paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Rasio Pendanaan macet dihitung dengan membandingkan posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan wanprestasi di atas 90 (sembilan puluh) hari dengan total posisi akhir (*outstanding*) Pendanaan. |  |  |
| 1. Penilaian kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: |  |  |
| * 1. lancar; |  |  |
| * 1. dalam perhatian khusus; |  |  |
| * 1. kurang lancar; |  |  |
| * 1. diragukan; dan |  |  |
| * 1. macet. |  |  |
| 1. Penilaian kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga Pendanaan atau imbal jasa/imbal hasil. |  |  |
| 1. Kriteria mengenai kualitas Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |
| 1. Selain penilaian terhadap komponen sebagaimana angka 3, Penyelenggara harus mempertimbangkan penilaian kualitatif, yaitu: |  |  |
| * 1. analisis kualitatif terhadap komponen-komponen sebagaimana angka 3 dengan menilai kontribusi dan signifikansi komponen; dan |  |  |
| * 1. kemampuan Penyelenggara dalam mengelola kualitas Pendanaan. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap komponen konsentrasi eksposur risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap parameter, antara lain: risiko konsentrasi kredit yang timbul akibat terkonsentrasinya penyaluran pendanaan kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, dan/atau geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang dapat mengancam kelangsungan usaha Penyelenggara, serta potensi meningkatnya keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo lebih dari 0 sampai dengan 90 hari yang berpotensi meningkatnya pendanaan kategori macet. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap komponen kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui pendekatan kualitatif antara lain:    1. kebijakan dan prosedur yang memadai sejalan dengan sasaran strategis Penyelenggara;    2. sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif yang memadai dalam memberikan informasi tingkat deviasi antara sasaran strategis dengan hasil pencapaian Penyelenggara. |  |  |
| 1. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor kualitas Pendanaan yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: |  |  |
| 1. peringkat 1; |  |  |
| 1. peringkat 2; |  |  |
| 1. peringkat 3; |  |  |
| 1. peringkat 4; dan |  |  |
| 1. peringkat 5, |  |  |
| dengan urutan peringkat faktor kualitas Pendanaan yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor kualitas Pendanaan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel II.A Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor kualitas Pendanaan dilakukan sesuai dengan tabel II.B. Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor kualitas Pendanaan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam tabel II.C Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: |  |  |
| 1. kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan |  |  |
| 1. tingkat efisiensi operasional. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap parameter atau indikator, yaitu: |  |  |
| * 1. *return on asset* (RoA)*;* |  |  |
| * 1. *return on equity* (RoE); dan |  |  |
| * 1. *return on Disbursement* (RoD). |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap parameter rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). |  |  |
| 1. Selain penilaian terhadap komponen sebagaimana angka 3 dan 4, Penyelenggara harus mempertimbangkan penilaian kualitatif, yaitu kemampuan Penyelenggara dalam mengelola rentabilitas melalui analisis terhadap kemampuan dalam strategi pendanaan, kebutuhan akan permodalan, dan pengelolaan beban Penyelenggara secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor rentabilitas yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: |  |  |
| 1. peringkat 1; |  |  |
| 1. peringkat 2; |  |  |
| 1. peringkat 3; |  |  |
| 1. peringkat 4; dan |  |  |
| 1. peringkat 5, |  |  |
| dengan urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan sesuai dengan tabel III.B. Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor rentabilitas menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam tabel III.C Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN FAKTOR LIKUIDITAS |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: |  |  |
| 1. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan potensi terjadinya ketidaksesuaian antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang; dan |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap kewajiban Penyelenggara dalam menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh persen), yang dihitung dengan membandingkan aset lancar dan liabilitas lancar. |  |  |
| 1. Selain penilaian terhadap komponen sebagaimana angka 3, Penyelenggara harus mempertimbangkan penilaian kualitatif atas kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas Penyelenggara melalui analisis atas manajemen pengelolaan likuiditas Penyelenggara antara lain terhadap pemahaman direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas, perencanaan, serta penilaian kecukupan likuiditas. |  |  |
| 1. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor likuiditas yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: |  |  |
| 1. peringkat 1; |  |  |
| 1. peringkat 2; |  |  |
| 1. peringkat 3; |  |  |
| 1. peringkat 4; dan |  |  |
| 1. peringkat 5, |  |  |
| dengan urutan peringkat faktor likuiditas yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor likuiditas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor likuiditas dilakukan sesuai dengan tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor likuiditas menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam tabel IV.C Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN FAKTOR MANAJEMEN |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen sebagai berikut: |  |  |
| 1. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain; |  |  |
| 1. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Penyelenggara; |  |  |
| 1. penerapan tata kelola yang baik; dan |  |  |
| 1. kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap komponen faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf c dilakukan dengan menilai penerapan tata kelola yang baik oleh manajemen Penyelenggara. |  |  |
| 1. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. |  |  |
| 1. Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi: |  |  |
| 1. keterbukaan; |  |  |
| 1. akuntabilitas; |  |  |
| 1. tanggung jawab; |  |  |
| 1. independensi; dan |  |  |
| 1. kewajaran. |  |  |
| 1. Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit diwujudkan dalam: |  |  |
| 1. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan rapat umum pemegang saham; |  |  |
| 1. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi; |  |  |
| 1. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris; |  |  |
| 1. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan pengawas syariah; |  |  |
| 1. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; |  |  |
| 1. penerapan manajemen risiko; |  |  |
| 1. penerapan strategi antifraud; |  |  |
| 1. penerapan fungsi kepatuhan; |  |  |
| 1. penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal; |  |  |
| 1. penanganan benturan kepentingan; |  |  |
| 1. penerapan kebijakan remunerasi; |  |  |
| 1. keterbukaan informasi; |  |  |
| 1. etika bisnis; |  |  |
| 1. kebijakan pembiayaan; |  |  |
| 1. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan |  |  |
| 1. rencana bisnis. |  |  |
| 1. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap komponen penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 6 mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap komponen faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 6 huruf f dilakukan dengan menilai kewajiban Penyelenggara dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif. |  |  |
| 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling sedikit mencakup:    1. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pengelola;    2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;    3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan    4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. |  |  |
| 1. Pedoman dan tata cara penilaian terhadap komponen penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |
| 1. Penyelenggara menetapkan peringkat faktor manajemen yang dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: |  |  |
| 1. peringkat 1; |  |  |
| 1. peringkat 2; |  |  |
| 1. peringkat 3; |  |  |
| 1. peringkat 4; dan |  |  |
| 1. peringkat 5, |  |  |
| dengan urutan peringkat faktor manajemen yang lebih kecil mencerminkan kondisi yang lebih baik. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor manajemen menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel V.A Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan sesuai dengan tabel V.B Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penyelenggara menilai faktor manajemen menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana tercantum dalam tabel V.C Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. TATA CARA PENILAIAN UUS |  |  |
| Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi UUS sebagaimana dimaksud dalam romawi IV sampai dengan romawi VIII mutatis mutandis berlaku bagi penilaian tingkat kesehatan bagi UUS. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan Penyelenggara ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor yaitu permodalan, kualitas Pendanaan, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen, dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Romawi II. |  |  |
| 1. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Penyelenggara perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. |  |  |
| 1. Dalam hal Penyelenggara menggunakan parameter dan/atau komponen tambahan pada setiap faktor Tingkat Kesehatan, Penyelenggara harus menginformasikan dalam laporan penilaian sendiri. |  |  |
| 1. Penyelenggara menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu: |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 1 (PK-1); |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 2 (PK-2); |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 3 (PK-3); |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan |  |  |
| * 1. Peringkat Komposit 5 (PK-5), |  |  |
| dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Penyelenggara yang lebih sehat. |  |  |
| 1. Penetapan Peringkat Komposit dilakukan sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENGKINIAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |
| 1. Penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dapat dikinikan sewaktu-waktu dalam hal Penyelenggara memenuhi kondisi tertentu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. |  |  |
| 1. Pengkinian atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dapat dilakukan di luar periode akhir bulan Desember. |  |  |
| Contoh: Penyelenggara menghadapi permasalahan signifikan pada bulan Juni akibat gagal bayar yang berdampak pada permodalan dan kinerja Penyelenggara secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, Penyelenggara melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan pada posisi akhir bulan Juni dengan mempertimbangkan kondisi permasalahan yang terjadi. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara untuk menyampaikan hasil pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Penyelenggara sewaktu-waktu dengan memberikan batas waktu penyampaian sesuai dengan kondisi Penyelenggara serta urgensi kebutuhan pengawasan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. RENCANA TINDAK |  |  |
| 1. Mengacu Pasal 207 dan Pasal 209 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan terdapat: |  |  |
| * 1. peringkat faktor ditetapkan peringkat 4 atau 5; |  |  |
| * 1. peringkat komposit Tingkat Kesehatan ditetapkan peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5; dan/atau |  |  |
| * 1. peringkat komposit ditetapkan peringkat komposit 3 namun terdapat masalah signifikan yang perlu diatasi agar tidak menganggu jalannya kelangsungan usaha Penyelenggara, |  |  |
| Penyelenggara harus menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan komitmen Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit memuat berupa langkah perbaikan yang nyata yang akan dilaksanakan oleh Penyelenggara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Penyelenggara untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud 1. |  |  |
| 1. Selain menyampaikan rencana tindak, Penyelenggara harus menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud angka 4 paling sedikit memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PELAPORAN |  |  |
| 1. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 1 dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember. |  |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Penyelenggara disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Penyelenggara menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 15 Februari tahun berikutnya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Romawi XII angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |
| * 1. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |
| * 1. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri Penyelenggara disampaikan paling lambat: |  |  |
| 1. pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara posisi akhir bulan Desember; atau |  |  |
| 1. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Penyelenggara, |  |  |
| melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak pada Romawi XII angka 4 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat: |  |  |
| * 1. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak; dan/atau |  |  |
| * 1. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu, |  |  |
| melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan/atau angka 5 jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara disampaikan pada hari kerja berikutnya. |  |  |
| 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4 dan/atau angka 5 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan dengan cara: |  |  |
| 1. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |
| 1. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan terjadinya gangguan teknis dimaksud melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyampaian hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya. |  |  |
| 1. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 7 telah berhasil diatasi dan sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan telah kembali normal maka hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara disampaikan kembali secara dalam jaringan. |  |  |
| 1. Penyampaian hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh direksi Penyelenggara. |  |  |
| 1. Hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, dan 5 disampaikan kepada: |  |  |
| * 1. Bagi Penyelenggara: |  |  |
| Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan |  |  |
| u.p. Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi |  |  |
| Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 |  |  |
| Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 |  |  |
| Jakarta 12710; |  |  |
| * 1. Bagi Penyelenggara Syariah: |  |  |
| Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan |  |  |
| u.p. Direktur Pengawasan Khusus dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah |  |  |
| Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11 |  |  |
| Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 |  |  |
| Jakarta 12710. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman. |  |  |
| 1. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan hasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan/atau laporan pelaksanaan rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut: |  |  |
| 1. untuk penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |
| 1. untuk penyampaian secara luar jaringan, dibuktikan dengan: |  |  |
| 1. tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, jika diserahkan langsung ke alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |
| 1. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman yang menunjukkan tanggal cap pos atau tanggal penerimaan dokumen hasil penilaian sendiri dan/atau rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara oleh perusahaan jasa pengiriman, jika hasil penilaian sendiri dan/atau rencana tindak atas penilaian Tingkat Kesehatan Penyelenggara dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman. |  |  |
|  |  |  |
| 1. PENUTUP |  |  |
| 1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Penyelenggara menyampaikan laporan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi laporan Desember 2025. |  |  |
| 1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal .......  KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA,    AGUSMAN |  |  |